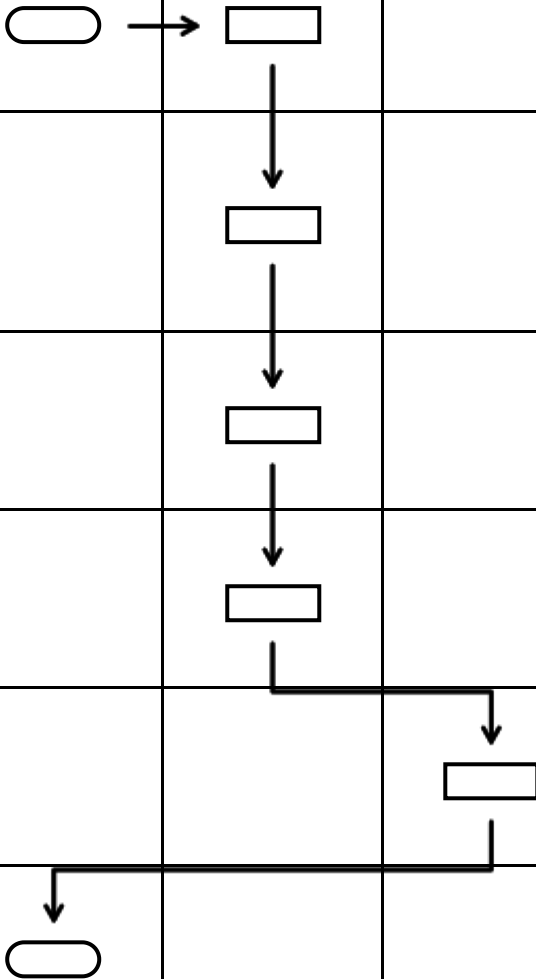


	SOP KANTOR UPBU KELAS III KAMBUAYA	Nomor SOP	SOP-UPBU-KBX. 035 Tahun 2026
		Tgl. Ditetapkan	23 September 2026
		Tgl. Revisi	
		Tgl. Diberlakukan	23 September 2026
		Ditetapkan Oleh	Kepala Kantor UPBU Kelas III Kambuaya  Akuila Manuel Wonatoei NIP. 19790515 200212 1 007
SOP Permohonan Informasi Publik			
Dasar Hukum :		Cara Mengatasi :	
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846); 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan; 3. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 122 Tahun 2018 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan; 4. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 38 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Komunikasi Publik; 5. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 118 Tahun 2021 Tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 40 Tahun 2014 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Unit Penyelenggara Bandar Udara; 6. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor PM 46 Tahun 2018 Tentang Pedoman Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kementerian Perhubungan.		1. Setiap permohonan informasi publik segera ditindaklanjuti dengan baik 2. Informasi yang dibagikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku	
Keterkaitan :		Peralatan :	
1. Permohonan Keberatan Informasi Publik		1. Komputer/ Laptop 2. Printer 3. Alat Tulis 4. Sistem Informasi Dokumentasi	
Peringatan :			
1. Informasi publik yang digunakan harus sesuai dengan klasifikasi dan tidak termasuk informasi yang dikecualikan			

No	Uraian Kegiatan	Pelaksana			Mutu Baku			Keterangan
		Masyarakat	Petugas Informasi	PPID	Kelengkapan	Waktu	Output	
1	Permohonan Informasi				Formulir Informasi	10 Menit	Formulir	
2	Memeriksa Syarat Pegajuan Permohonan Informasi				Identitas Pemohon Informasi (KTP/NPWP/Akta Pendirian Badan Hukum)	10 Menit	Data Pemohon	
3	Registrasi dan Meneruskan Permohonan Informasi untuk diproses				Register Permohonan Informasi	10 Menit	Data Permohonan Informasi	
4	Memproses permohonan				Koordinasi dengan Pemilik Informasi (Unit Kerja)	5 Hari Kerja	Surat	
5	Memberikan Formulir Pemberitahuan Tertulis				Formulir Pemberitahuan Tertulis	1 Hari Kerja	Formulir	
6	Menyampaikan Permohonan Informasi dan Tanda Terima Informasi				Tanda Terima Informasi	1 Hari Kerja	Tanda Terima	



SOP
KANTOR UPBU KELAS III
KAMBUAYA

Nomor SOP	SOP-UPBU-KBX. 036 Tahun 2026
------------------	------------------------------

Tgl. Ditetapkan	23 September 2026
------------------------	-------------------

Tgl. Revisi

Tgl. Diberlakukan	23 September 2026
--------------------------	-------------------

Ditetapkan Oleh

Kepala Kantor
UPBU Kelas III Kambuaya



Akuila Manuel Wonatoei
NIP. 19790515 200212 1 007

SOP Pengajuan Keberatan Informasi

Dasar Hukum :

1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan;
3. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 122 Tahun 2018 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan;
4. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 38 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan komunikasi Publik;
5. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 118 Tahun 2021 Tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 40 Tahun 2014 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Unit Penyelenggara Bandar Udara;
6. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor PM 46 Tahun 2018 Tentang Pedoman Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kementerian Perhubungan.

Cara Mengatasi :

1. Setiap terdapat pengajuan keberatan informasi segera ditangani dengan baik
2. Periksa syarat, ketentuan dan alasan pengajuan keberatan, proses sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku

Keterkaitan :

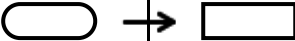
1. Permohonan Informasi Publik
2. Sengketa Informasi Publik

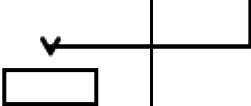
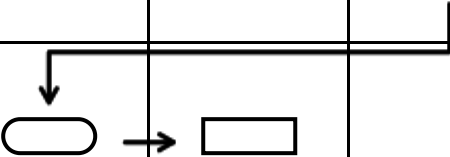
Peringatan :

1. Pengajuan keberatan informasi publik harus diproses sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku

Peralatan :

1. Komputer/Laptop
2. Alat tulis kantor
3. Printer
4. Sistem Informasi Dokumentasi

No	Uraian Kegiatan	Pelaksana				Mutu Baku			Keterangan
		Masyarakat	Petugas Informasi	PPID	Atasan PPID	Kelengkapan	Waktu	Output	
1	Menerima surat keberatan informasi					Formulir keberatan informasi	10 Menit	Formulir	
2	Memeriksa syarat-syarat pengajuan keberatan informasi		 			Formullir permohonan informasi, identitas pemohon (KTP/NPWP/Ak ta Pendirian Badan Hukum)	10 Menit	Data	
3	Registrasi dan meneruskan keberatan informasi untuk di proses		 			Register Keberatan Informasi	10 Menit	Data	
4	Memproses keberatan		 			Formulir permohonan informasi, keberatan informasi	10 Hari Kerja	Surat	
5	Membuat tanggapan atas keberatan dalam bentuk keputusan				 	Keputusan Atasan PPID	5 Hari Kerja	Keputusan	
									

No	Uraian Kegiatan	Pelaksana				Mutu Baku			Keterangan
		Masyarakat	Petugas Informasi	PPID	Atasan PPID	Kelengkapan	Waktu	Output	
									
6	Melaksanakan keputusan tertulis					Keputusan Atasan PPID	1 Hari Kerja	Data	
7	Memberikan informasi publik dan tanda terima informasi					Tanda terima informasi	1 Hari Kerja	Tanda Terima	

	SOP KANTOR UPBU KELAS III KAMBUAYA	Nomor SOP	SOP-UPBU-KBX. 037 Tahun 2026
		Tgl. Ditetapkan	23 September 2026
		Tgl. Revisi	
		Tgl. Diberlakukan	23 September 2026
		Ditetapkan Oleh	Kepala Kantor UPBU Kelas III Kambuaya  Akuila Manuel Wonatoei NIP. 19790515 200212 1 007
SOP Penyelesaian Sengketa Informasi Publik			
Dasar Hukum :		Cara Mengatasi :	
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61); 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 112); 3. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 Tentang Pelaksana Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99); 4. Peraturan Presiden Nomor 40 Tahun 2015 Tentang Kementerian Perhubungan (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 27); 5. Peraturan Komisi Informasi Pusat Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 649); 6. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 50 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Peta Proses Bisnis dan Standar Oprasional Prosedur di Lingkungan Kementerian Perhubungan ; 7. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 46 tahun 2018 Tentang Pedoman Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kementerian Perhubungan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 675);		1. Membutuhkan personel yang komunikatif dan handal dalam pemecahan masalah informasi publik	
Keterkaitan :		Peralatan :	
1. SOP Pengajuan Keberatan Informasi		1. Komputer/Laptop 2. Alat Tulis 3. Printer	
Peringatan :			
1. Apabila tidak dilaksanakan maka akan menghambat pemberian informasi			

